



Antara Kampus Dan Kekerasan: Mengungkap Pola Sistemik Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Di Pulau Jawa

Ajeng Kristha Sekar Larasati, Maulidia Arifiyani Putri, Puteri Asmarani

Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Email:¹ajeng.krishasl79@gmail.com;²maulidiaarifiyani@gmail.com;³puteriasmarani4@gmail.com

INFO ARTIKEL

ABSTRAK

Kekerasan di perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan tren peningkatan sebanyak 82 kasus (Komnas Perempuan, 2021-2024). Fenomena kompleks ini melibatkan faktor individu (internal) dan sistemik (eksternal) yang menciptakan lingkungan akademik yang tidak aman. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji interaksi antara faktor internal- eksternal yang berkontribusi terhadap kekerasan seksual dan mengevaluasi implementasi kebijakan di 6 perguruan tinggi di Pulau Jawa. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif menggunakan data sekunder (2023-2025) dari pemberitaan media, dokumen kebijakan dan literatur akademis melalui analisis isi. Studi kasus meliputi UI, UGM, UNDIP, UNAIR, UNPAD, dan UNTIRTA. Temuan utama penelitian mengungkapkan: 1) Faktor internal (Kontrol diri yang rendah, pelepasan moral) saling mempengaruhi dengan faktor eksternal (Pengawasan yang lemah, struktur hierarki); 2) Hanya 33% Kasus yang dilaporkan ke satuan tugas kampus (PPKS) karena ketidakpercayaan; 3) Implementasi kebijakan masih belum konsisten antar institusi. Pencegahan yang komprehensif memerlukan: 1) Pendidikan gender yang terintegrasi dengan kurikulum; 2) Sistem Pelaporan yang terstandardisasi; 3) Transformasi budaya menuju lingkungan akademik yang beretika.

ABSTRACT

Violence in higher education institutions in Indonesia has shown an increasing trend, with 82 cases reported (Komnas Perempuan, 2021-2024). This complex phenomenon involves individual (Internal) and systemic (External) factors that create an unsafe academic environment. This study examines the interaction between internal and external factors contributing to sexual violence and evaluates the implementation of policies at six universities on the island of Java. This study used Qualitative descriptive analysis using secondary data (2023-2025) from media reports, policy documents, and academic literature

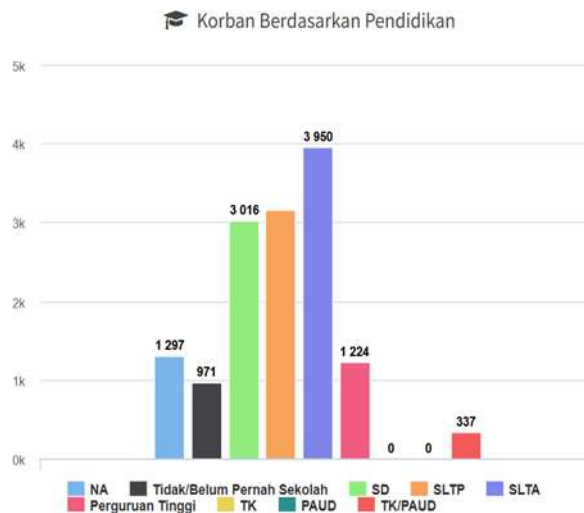
through content analysis. Case studies include UI, UGM, UNDIP, UNAIR, UNPAD, and UNTIRTA. Key findings of this study revealed: 1) Internal factors (Low self-control, moral laxity) interact with external factors (weak oversight, hierarchical structure); 2) Only 33% of cases are reported to the campus task force (PPKS) due to lack of trust; 3) Policy implementation remains inconsistent across institutions. Comprehensive prevention requires: 1) Gender education integrated into the curriculum; 2) A standardized reporting system; 3) Cultural transformation toward an ethical academic environment.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan isu yang semakin mendapatkan perhatian dalam beberapa tahun terakhir (Quran, 2022). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara psikologis dan fisik, melainkan juga menciptakan lingkungan akademik yang tidak aman dan diskriminatif (Ardinata et al., 2025). Di Indonesia, laporan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi menunjukkan kecenderungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data Komnas Perempuan (2021 - 2024) menunjukkan terdapat 82 kasus pengaduan kekerasan seksual di perguruan tinggi, dengan mayoritas terjadi di kawasan Pulau Jawa (Faturahmah, 2025). Namun kasus ini masih terdapat informasi yang tersembunyi karena korban enggan melapor akibat stigma sosial dan ketakutan terhadap sanksi sosial (Wulandari & Saefudin, 2024).

Berdasarkan data pada gambar 1. dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), sepanjang periode pelaporan per Juni 2025 tercatat sebanyak 1.224 korban kekerasan seksual berasal dari kalangan pendidikan tinggi (SIMFONI PPA, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa merupakan kelompok yang cukup beresiko terhadap kekerasan seksual. Angka ini tidak hanya menggambarkan besarnya besarnya jumlah korban, melainkan menunjukkan bahwa lingkungan kampus yang seharusnya menjadi ruang belajar, justru menimbulkan *loophole* dalam hal perlindungan dan keadilan berbasis gender.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa kampus, yang seharusnya menjadi ruang aman dan pendidikan bagi mahasiswa, justru menggambarkan lemahnya sistem perlindungan, sehingga membuka ruang traumatis akibat kekerasan seksual (Ardinata et al., 2025). Situasi ini mencerminkan bahwa budaya akademik di perguruan tinggi masih dipengaruhi oleh struktur yang hirarkis dan belum adil, serta sistem pendidikan tinggi belum mampu membenahi kelemahannya dalam melindungi warga kampus Bondestam & Lundqvist (2020). Kondisi tersebut memperkuat bahwa isu kekerasan seksual bukan hanya persoalan personal dan hukum, melainkan mencerminkan kualitas pendidikan tinggi secara menyeluruh, yang selama ini hanya berfokus pada pencapaian akademik, tanpa mempertimbangkan aspek etika, kemanusiaan, kesetaraan, serta kualitas kelembagaan (Sasqiandini et al., 2025).



Gambar 1. Jumlah Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Pendidikan

Sumber : SIMFONI PPA (2025)

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual di kampus tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal dari pelaku dan korban, tetapi juga oleh faktor eksternal yakni kondisi sistemik dan budaya institusi di perguruan tinggi (Ardinata et al., 2025). Penelitian sebelumnya telah mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi fenomena kekerasan seksual di perguruan tinggi, antara lain yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal, seperti persepsi yang kurang tepat mengenai norma seksual, rendahnya kontrol diri, stres akademik, dan rendahnya kecerdasan emosional sehingga ditemukan keterkaitan antara kerentanan mahasiswa terhadap kekerasan seksual, baik sebagai pelaku maupun korban (Lando-King et al., 2015). Misalnya Salsabila et al. (2022) menunjukkan bahwa tingginya stres akademik dan minimnya dukungan sosial secara signifikan memengaruhi kesehatan mental mahasiswa, yang dalam kondisi ekstrem dapat memicu perilaku *maladaptive*, termasuk perilaku agresif atau pasif terhadap kekerasan. Dewi (2014) juga menemukan bahwa kontrol diri yang rendah pada mahasiswa berkorelasi positif dengan perilaku seksual menyimpang, menunjukkan bahwa pengendalian diri menjadi kunci dalam mencegah keterlibatan dalam kekerasan seksual, baik sebagai pelaku maupun korban.

Faktor eksternal, seperti lemahnya regulasi perguruan tinggi, lingkungan yang permisif terhadap kekerasan, serta minimnya sistem pelaporan dan pendampingan korban (Khairani & Masitah, 2024). Bondestam & Lundqvist (2020) menyatakan bahwa universitas dengan sistem perlindungan yang lemah cenderung menormalisasi kekerasan seksual karena tidak adanya sanksi sosial dan institusional. Di Indonesia, Al Bahi et al. (2023) mengungkapkan bahwa banyak mahasiswa masih memiliki persepsi permisif terhadap tindakan pelecehan seksual non-fisik, yang diperparah oleh tidak adanya edukasi kampus yang sistematis tentang batas perilaku seksual dan mekanisme pelaporan. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara komprehensif faktor-faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi agar mampu merancang intervensi yang efektif dan tepat sasaran.

Meskipun sudah banyak penelitian mengenai kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, namun terdapat beberapa celah yang belum dieksplorasi. Pertama,

kurangnya integrasi keterkaitan antara faktor internal dan eksternal yang menjadi penyebab kekerasan seksual. Penelitian sebelumnya hanya fokus pada satu dimensi, padahal kekerasan seksual adalah fenomena yang kompleks serta bisa dipengaruhi oleh faktor pribadi dan sistemik. Kedua, terbatasnya data empiris di Indonesia juga menjadi kendala, karena sebagian besar literatur menggunakan data dari konteks luar negeri, sehingga pembahasannya kurang spesifik terhadap lingkungan kampus di Indonesia yang memiliki ciri budaya dan norma sosial yang khas. Ketiga, belum ada model konseptual yang menyeluruh untuk memahami bagaimana faktor internal dan eksternal saling berhubungan dalam meningkatkan atau mengurangi risiko kekerasan seksual di perguruan tinggi. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi kekurangan ini, penelitian selanjutnya dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan solusi yang efektif untuk mengatasi kekerasan seksual di pendidikan tinggi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis keterkaitan antara kualitas pendidikan tinggi dan fenomena kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Indonesia. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali makna dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual (Pola Anto et al., 2024) Jenis penelitian ini bersifat eksploratif, dengan fokus utama pada identifikasi tren, pola, dan struktur yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual, serta bagaimana kualitas pendidikan turut berperan dalam memperkuat atau mencegahnya.

Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan sebelumnya, baik dalam bentuk laporan, artikel media, dokumen kebijakan, maupun publikasi lembaga resmi. Sumber data sekunder yang digunakan meliputi:

1. Media Massa Nasional, seperti Tempo, Kompas, Tirto.id, CNN Indonesia, dan The Conversation Indonesia, yang menyediakan pelaporan investigatif dan analisis kasus.
2. Dokumen Kebijakan Pemerintah, seperti Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, serta Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 sebagai penyempurna kebijakan sebelumnya.
3. Jurnal ilmiah, skripsi, dan artikel akademik, baik nasional maupun internasional, yang membahas aspek psikologis dan perilaku mahasiswa seperti persepsi terhadap kekerasan, kontrol diri, stres akademik, dan dukungan sosial

Periode data yang dikumpulkan adalah dari tahun 2023 hingga 2025, dengan tujuan untuk menganalisis kasus - kasus kekerasan seksual terkini di lingkungan perguruan tinggi, serta mengevaluasi dinamika implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan dalam konteks mutakhir. Penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui metode dokumentasi dan penelusuran online terhadap sumber - sumber sekunder yang relevan. Laporan yang digunakan dipilih berdasarkan kredibilitas lembaga penerbit,

ketersediaan data tahun, dan keterkaitan dengan topik.

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara tematik. Metode ini dipilih untuk mengidentifikasi pola-pola bermakna dalam dokumen dan laporan sekunder terkait kekerasan seksual di perguruan tinggi, serta menghubungkannya dengan aspek-aspek kualitas pendidikan tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tren dan Pola Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Dalam periode 2023 - 2025, kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi masih menjadi masalah serius yang mencerminkan lemahnya sistem perlindungan di lingkungan akademik. Berdasarkan dokumentasi media dan publikasi lembaga masyarakat sipil, penelitian ini menganalisis enam universitas negeri di Pulau Jawa, yaitu Universitas Indonesia (UI) untuk mewakili provinsi DKI Jakarta, Universitas Diponegoro (UNDIP) untuk mewakili provinsi Jawa Tengah, Universitas Airlangga (UNAIR) untuk mewakili provinsi Jawa Timur, Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mewakili provinsi Yogyakarta, Universitas Padjadjaran (UNPAD) untuk mewakili provinsi Jawa Barat, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA) untuk mewakili provinsi Banten. Pemilihan kampus ini didasarkan pada ketersediaan informasi kasus serta tanggapan dari pihak kampus.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, dari keenam universitas tersebut ditemukan beberapa kasus kekerasan seksual dengan jenis kekerasan yang bervariasi, mulai dari pelecehan non-fisik seperti perekaman tanpa izin (UI dan UNAIR), pelecehan fisik dan verbal antar mahasiswa (UNDIP), hingga kekerasan seksual dengan dimensi kekuasaan struktural seperti yang dilakukan guru besar terhadap mahasiswa (UGM). Rincian kasus dapat dilihat pada tabel 1.

Relasi kuasa antara pelaku dan korban menjadi pola umum dalam sebagian besar kasus. Di UGM, seorang guru besar dari Fakultas Farmasi terbukti melakukan pelecehan fisik terhadap mahasiswa dengan modus pendampingan untuk persiapan lomba dan bimbingan (Kompas, 2025). Sementara di UNPAD, seorang mahasiswa dokter spesialis (Dokter PPDS) tega melakukan pelecehan seksual terhadap anak dari pasiennya, yang menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan posisi sosial dan akademiknya untuk melakukan tindakan menyimpang (Tempo, 2025).

Tabel 1. Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Universitas	Tahun Kejadian	Bentuk Kekerasan	Sumber	Respons Kampus	Satgas PPKS
UI	2025	Pelecehan Non-fisik melalui perekaman diam - diam oleh mahasiswa dokter spesialis (dokter PPDS) kepada mahasiswi yang sedang	Metro TV News	Melakukan penyelidikan tindak lanjut dan memberhentikan status akademik tersangka	Ada, namun korban tidak melapor ke satgas PPKS melainkan ke Polres

Antara Kampus Dan Kekerasan: Mengungkap Pola Sistematis Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Di Pulau Jawa

		mandi			
UNDIP	2024	Pelecehan Verbal, fisik, psikologis antar mahasiswa	Kumparan News	Melakukan penyelidikan melalui pembina UKM Basket, namun minim informasi	Ada, namun korban tidak mengadakan ke satgas
UNAIR	2025	Pelecehan Non-fisik (penjualan atas rekaman video hasil pelecehan) oleh alumni	iNews	Tidak terdapat respon dari pihak kampus karena pelaku tidak berhubungan dengan institusi karena sudah lulus	Ada
UGM	2024	Pelecehan fisik oleh Guru Besar Fakultas Farmasi kepada mahasiswa	Kompas	Pimpinan memberikan sanksi kepada pelaku berupa pemberhentian tetap dari jabatan sebagai dosen	Ada, pimpinan fakultas korban melakukan aduan kepada PPKS
UNPAD	2025	Pelecehan fisik oleh mahasiswa dokter spesialis kepada seorang anak dari pasiennya	Tempo	Melakukan rapat bersama komite etik disiplin dan anti perundungan dan pemberian sanksi berupa pemutusan studi dan pencabutan status mahasiswa	Ada, namun korban melaporkan kepada Polisi
UNTIRTA	2023	Pelecehan fisik dan non-fisik melalui <i>revenge porn</i> oleh	Kompas	Pimpinan Universitas memberhentikan tersangka dari status akademiknya	Ada, saudara korban melakukan pengaduan kepada satgas PPKS

Sumber : Data diolah (2025)

Dari kasus - kasus yang direkap oleh peneliti, dari tiap - tiap institusi memberikan respons yang beragam. Beberapa kampus menunjukkan langkah tegas, seperti UGM dengan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap pelaku guru besar, dan UNPAD memberikan sanksi berupa pemutusan studi dan pencabutan status mahasiswa

bagi pelaku. Namun disisi lain, pimpinan kampus UNAIR menyatakan tidak mengambil tindakan langsung terhadap kasus kekerasan seksual mengingat pelaku adalah seorang alumni yang dinilai sudah tidak memiliki hubungan lagi dengan institusi (iNews, 2025)

Berdasarkan kebijakan dari pemerintah mengenai penanganan kasus kekerasan seksual melalui satgas PPKS, ternyata keberadaan satgas tersebut masih belum sepenuhnya efektif dalam penanganan kasus - kasus. Pada kasus di UI dan UNPAD, korban justru melapor langsung ke pihak kepolisian dibandingkan kepada satgas PPKS di kampus setempat. Sementara di UNDIP, korban enggan melaporkan perlakuan tersangka kepada satgas PPKS kampusnya. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepercayaan terhadap satgas PPKS masih rendah, atau informasi mengenai mekanisme pelaporan belum tersosialisasi dengan baik. Berbeda dengan UNTIRTA, pada kasus pelecehan revenge porn oleh mahasiswa teknik, pihak yang melakukan pengaduan ke satgas PPKS adalah saudara korban, bukan korban itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan satgas PPKS belum sepenuhnya menciptakan ruang yang aman dan suportif bagi korban untuk melapor langsung, diakibatkan adanya ketakutan terhadap stigma, keraguan atas proses yang berpihak dan penjaminan kerahasiaan (Wulandari & Saefudin, 2024) .

Secara umum, kasus - kasus yang ditemukan memperlihatkan kecenderungan bahwa budaya diam masih cukup dominan, terutama dalam kasus yang tidak ditangani secara transparan seperti di UNDIP (KumparanNews, 2024). Laporan media tersebut menyebutkan bahwa pihak kampus menyatakan melakukan penyelidikan melalui pembina Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Basket, namun tidak memberikan informasi lebih lanjut kepada publik. Bahkan pada kasus di UNAIR, pihak pimpinan tidak mengeluarkan pernyataan formal terhadap tindakan pelaku karena statusnya sebagai alumni.

Dari berbagai data kasus ini mengindikasikan bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi bukan hanya berkaitan dengan individu pelaku, melainkan pola sistemik yang memungkinkan kekerasan terjadi berulang kali, tidak tersedianya sanksi yang konsisten, lemahnya pengawasan internal, dan masih terbatasnya integrasi pendidikan etika serta gender dalam sistem pendidikan tinggi.

Analisis Faktor Penyebab: Interaksi Internal dan Eksternal

Lebih lanjut, berdasarkan Tabel 1, dapat dianalisis lebih lanjut mengenai faktor penyebab terjadinya kasus kekerasan seksual yang melibatkan dua faktor: faktor internal (persepsi, kontrol diri, stres) dan eksternal (budaya kampus, sistem pelaporan, struktur kuasa). Rincian pembandingan faktor internal dan eksternal terlihat pada tabel 2.

Kasus Universitas Indonesia (UI)

Kasus kekerasan seksual di UI melibatkan tindakan perekaman aktivitas pribadi mahasiswa tanpa izin oleh rekan seangkatan. Secara eksternal, hal ini menunjukkan kelemahan dalam edukasi preventif dan minimnya mekanisme pengawasan dalam kehidupan mahasiswa. Faktor internal pelaku yang teridentifikasi adalah persepsi keliru terhadap privasi dan relasi personal. Pelaku mengaku mengagumi korban tetapi tidak mampu mengekspresikannya secara sehat. Ini menunjukkan adanya defisit kontrol diri dan empati. Penelitian oleh Al Bahi et al. (2023) menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap kekerasan seksual masih bervariasi, dan sebagian masih menganggap tindakan non-fisik sebagai “hal biasa”, yang mengindikasikan lemahnya kesadaran batasan

Antara Kampus Dan Kekerasan: Mengungkap Pola Sistematis Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Di Pulau Jawa

perilaku seksual dalam kampus.

Kasus Universitas Diponegoro (UNDIP)

Di UNDIP, kasus pelecehan fisik dan verbal terjadi antar mahasiswa di lingkungan organisasi kemahasiswaan. Faktor eksternal seperti budaya organisasi yang tidak responsif terhadap pelaporan kekerasan serta tidak adanya SOP penanganan menjadi pemicu utama. Namun, pelaku juga menunjukkan karakteristik faktor internal berupa kecenderungan impulsif dan normalisasi kekerasan verbal, yang menunjukkan rendahnya pengendalian emosi dan kesadaran etika relasi sosial. Hal ini didukung oleh Dewi (2014) yang menemukan bahwa mahasiswa dengan kontrol diri rendah cenderung menunjukkan perilaku seksual menyimpang, terutama dalam interaksi interpersonal yang tidak terkontrol oleh norma kelompok.

Kasus Universitas Airlangga (UNAIR)

Kasus di UNAIR melibatkan perekaman visual tanpa izin oleh mahasiswa laki-laki terhadap korban perempuan di lingkungan kampus. Tindakan ini terjadi karena kelengahan sistem pengawasan dan kurangnya edukasi tentang kekerasan seksual berbasis teknologi. Di sisi lain, pelaku menganggap tindakannya bukan bentuk kekerasan, melainkan 'hiburan pribadi', yang mencerminkan persepsi keliru dan kesenjangan pemahaman moralitas. Menurut Dewi & Tutpai (2025), rendahnya kesadaran diri (*self-awareness*) terkait *personal safety* dan batasan perilaku seksual dapat meningkatkan potensi tindakan agresif yang tidak disadari sebagai kekerasan oleh pelaku. Hal ini memperlihatkan interaksi nyata antara lemahnya sistem edukasi kampus (faktor eksternal) dan persepsi pribadi yang menyimpang (faktor internal).

Kasus Universitas Gadjah Mada (UGM)

Dalam kasus yang terjadi di Universitas Gadjah Mada (UGM), kasus ini mencerminkan adanya ketimpangan relasi kuasa yang memungkinkan pelaku menyalahgunakan posisi akademiknya dalam sudut pandang struktural. Hal ini sejalan dengan temuan Bondestam & Lundqvist (2020) bahwa kekerasan seksual di kampus kerap terjadi akibat relasi hierarkis yang tidak dikontrol oleh sistem etik. Dari sisi internal, pelaku menunjukkan persepsi keliru terhadap batas relasi profesional dan minim kontrol diri. Kontrol sosial yang lemah di lingkungan akademik memungkinkan individu yang memiliki kekuasaan untuk bertindak menyimpang karena merasa aman dari sanksi.

Kasus Universitas Padjadjaran (UNPAD)

Pada kasus di Universitas Padjadjaran (UNPAD), kasus ini menjadi perhatian publik karena pelaku berasal dari latar akademik tinggi dan menempati posisi sosial yang dipercaya publik. Dari sisi eksternal, kasus ini mencerminkan ketidakjelasan pengawasan etis dalam praktik pendidikan klinis, serta lemahnya pembinaan karakter dalam institusi akademik yang seharusnya menjunjung profesionalisme dan perlindungan terhadap kelompok rentan. Secara internal, pelaku memperlihatkan penyimpangan dalam kontrol impuls dan empati, serta rendahnya kesadaran moral dalam menghadapi situasi interpersonal yang melibatkan kekuasaan. Studi oleh Salsabila et al. (2022) menunjukkan bahwa tekanan akademik dan sosial pada mahasiswa profesi dapat berkontribusi pada disfungsi emosi jika tidak dibarengi dengan kecerdasan emosional dan pembinaan spiritual yang memadai. Hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan tinggi perlu menyeimbangkan pencapaian akademik dengan pembentukan karakter dan empati profesional.

Kasus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA)

Kasus di UNTIRTA menyangkut dugaan kekerasan seksual oleh dosen terhadap mahasiswi saat bimbingan skripsi. Ini menunjukkan kerentanan relasi akademik yang tidak memiliki batas etik yang jelas. Faktor eksternal meliputi lemahnya SOP pendampingan dan budaya kampus yang belum berpihak pada korban. Dari sisi internal, pelaku menunjukkan manipulasi relasi kuasa dan rendahnya empati. Al Bahi et al. (2023) mencatat bahwa banyak mahasiswa dan dosen masih memiliki persepsi bias terhadap kekerasan seksual, sehingga menyulitkan proses edukasi etik dan pencegahan struktural.

Tabel 2. Analisis Interaksi Faktor Internal-Eksternal

Universitas	Faktor Internal	Faktor Eksternal
UI	<ul style="list-style-type: none">- persepsi keliru soal privasi- kontrol diri rendah	<ul style="list-style-type: none">- minim edukasi soal kekerasan seksual berbasis teknologi- tidak ada sanksi tegas di awal
UNDIP	<ul style="list-style-type: none">- impulsivitas- normalisasi kekerasan dalam interaksi sosial	<ul style="list-style-type: none">- budaya organisasi tidak responsif- tidak ada SOP anti-kekerasan
UNAIR	<ul style="list-style-type: none">- menganggap tindakan sebagai “hiburan”- minim empati & kesadaran moral	<ul style="list-style-type: none">- minim edukasi soal kekerasan seksual berbasis teknologi
UGM	<ul style="list-style-type: none">- persepsi menyimpang relasi profesional- kontrol emosi rendah	<ul style="list-style-type: none">- relasi kuasa hierarkis- lemahnya sistem pengawasan etik
UNPAD	<ul style="list-style-type: none">- Tekanan/stres akademik tinggi- kurang empati profesional	<ul style="list-style-type: none">- lemahnya pembinaan karakter profesi- tidak ada mekanisme etik jelas
UNTIRTA	<ul style="list-style-type: none">- manipulasi kepercayaan- sikap dominatif terhadap korban	<ul style="list-style-type: none">- budaya menyalahkan korban- SOP bimbingan tidak berpihak korban

Sumber : Data diolah (2025)

Kekerasan Seksual sebagai Cerminan Kualitas Pendidikan dan Evaluasi Kebijakan

Kasus kekerasan seksual yang terjadi di berbagai perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa masalah kekerasan seksual ini tidak dapat dipisahkan dari kualitas pendidikan tinggi secara holistik. Pendidikan yang bermutu tidak hanya ditekankan melalui pencapaian akademik, tetapi juga harus memberikan pemahaman atas nilai-nilai

Antara Kampus Dan Kekerasan: Mengungkap Pola Sistematis Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Di Pulau Jawa

etika, empati, kontrol diri, serta menjamin HAM bagi seluruh civitas akademik. Di Universitas Indonesia (UI), kasus kekerasan seksual yang terjadi dengan melakukan perekaman aktivitas pribadi mahasiswa tanpa izin oleh korban. Kasus di UI ini mencerminkan lemahnya edukasi preventif serta mekanisme pengawasan dan pemahaman etika privasi di kalangan civitas akademik masih minim. Pada kasus di Universitas Diponegoro (UNDIP), dimana melibatkan pelecehan fisik maupun verbal antar mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan mengindikasikan bahwa budaya organisasi kemahasiswaan dan ketidakhadiran SOP penanganan menjadi faktor eksternal yang semakin memperburuk kekerasan, di samping kecenderungan impulsif pelaku sebagai faktor internal. Selain kedua kasus tersebut, kasus serupa terjadi di Universitas Airlangga (UNAIR), dimana seorang mahasiswa merekam korban secara visual tanpa izin, menunjukkan bahwa kekerasan seksual berbasis teknologi belum dipahami secara utuh oleh mahasiswa dan belum sepenuhnya dijadikan materi edukasi sistemik oleh pihak kampus.

Di Universitas Gadjah Mada (UGM), kasus kekerasan seksual melibatkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara dosen dan mahasiswa dalam konteks bimbingan akademik. Kasus yang terjadi di UGM menegaskan bahwa struktur institusional yang hierarkis dan kurang akuntabel dapat membuka ruang terjadinya penyalahgunaan kuasa. Tidak hanya dari faktor struktural, kasus ini juga menunjukkan kekurangan dalam segi pemahaman pelaku terhadap batas profesional relasi akademik. Hal ini diperkuat Bondestam & Lundqvist (2020) yang menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan kampus kerap dipicu oleh relasi kuasa yang seimbang dan lemahnya sistem akuntabilitas institusional. Di sisi lain, penelitian Damayanti *et al* (2023) dan Nafisah & Rizqi (2024) menegaskan bahwa persepsi permisif terhadap kekerasan seksual non fisik masih banyak ditemukan di kalangan mahasiswa, terutama ketika pelaku dan korban berada dalam hubungan sosial yang ambigu. Norma teman sebaya dan budaya patriarki di kampus memperburuk keadaan ini dengan mendorong korban untuk diam dan menoleransi perilaku pelaku, sehingga menciptakan ruang bau-bau yang membiarkan kekerasan seksual berlangsung tanpa intervensi yang tegas.

Kemudian, kasus di Universitas Padjadjaran (UNPAD), yang menyeret pelaku dengan sosial tinggi, menyingkap lemahnya pengawasan etis dalam praktik pendidikan klinis dan absennya pembinaan karakter berbasis profesionalisme. Dalam kasus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (UNTIRTA), kekerasan seksual terjadi dalam konteks akademik seperti bimbingan skripsi antara mahasiswa dengan dosen. Pada kasus UNTIRTA menunjukkan bahwa terdapat indikasi manipulasi akademik dan budaya kampus yang cenderung menyalahkan korban. Meski sudah terbentuknya satgas PPKS di masing-masing universitas tersebut, implementasi dari Permendikbudristek No.30 tahun 2021 dan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 belum optimal ditunjukkan dari lemahnya SOP pengaduan dan pendampingan korban.

Secara umum, temuan-temuan dari universitas-universitas tersebut menegaskan bahwa penyediaan ruang yang aman serta adil bagi civitas akademika tidak dapat disediakan, maka universitas tersebut sejatinya telah gagal dalam menjalankan mandat pendidikan tinggi yang bermutu. Kekerasan seksual bukan hanya pelanggaran etika individu, tetapi juga mencerminkan defisit sistemik dalam membentuk lingkungan pendidikan yang menjunjung nilai-nilai keadilan, kesetaraan gender dan hak asasi

manusia. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan kekerasan seksual harus ditempatkan dalam kerangka pembaruan kualitas pendidikan yang menyeluruh meliputi reformasi struktural, penguatan budaya etik, dan integrasi pendidikan karakter ke dalam kurikulum dan kehidupan kampus.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia merupakan masalah serius yang mencerminkan lemahnya sistem perlindungan dan kualitas pendidikan yang ada. Temuan menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal individu, seperti persepsi dan kontrol diri, tetapi juga faktor eksternal yang berkaitan dengan budaya kampus dan sistem regulasi yang ada. Meskipun telah ada upaya untuk menangani masalah ini melalui pembentukan Satgas PPKS, implementasi kebijakan tersebut masih belum optimal, terlihat dari rendahnya tingkat kepercayaan korban untuk melapor dan ketidakjelasan mekanisme pelaporan. Dari analisis kasus di enam universitas negeri di Pulau Jawa, ditemukan bahwa relasi kuasa yang tidak seimbang, budaya diam, dan minimnya edukasi tentang kekerasan seksual berkontribusi pada terjadinya kekerasan. Kasus - kasus yang terjadi menunjukkan bahwa pendidikan tinggi harus lebih dari sebatas pencapaian akademik, melainkan perlunya menanamkan nilai - nilai etika, empati, dan kesadaran akan hak asasi manusia di kalangan civitas akademik.

Oleh karena itu, untuk mencegah kekerasan seksual di perguruan tinggi, diperlukan pendekatan yang komprehensif yang mencakup reformasi struktural, penguatan budaya etik, dan mengimplementasikan pendidikan karakter dalam kurikulum. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi lebih mendalam mengenai interaksi antara faktor eksternal dan internal serta mengembangkan model konseptual yang lebih komprehensif untuk memahami dan menangani kekerasan seksual di perguruan tinggi.

Referensi

- Al Bahi, M., Achyar Akbar, M., Hikmah, I., Akmaludin, A. H., & Putri, S. B. (2023). Persepsi mahasiswa terhadap penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas PGRI Semarang. *Jurnal Rontal: Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(2).
- Anto, R. P., Nur, N., Yusriani, Ardah, F. K., Ayu, J. D., Nurmahdi, A., ... Putra, M. F. P. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Penerapannya*. (S.N.I. Trisnawati,Ed.). CV Tahta Media Grup.
- Ardinata, M., Sinung, M. H., & Suryani, I. (2025). Identification Of Sexual Violence Cases In Higher Education: A Human Rights And Academic Ethics Perspective Identifikasi Kasus Kekerasan Seksual Pada Tatanan Pendidikan Tinggi : Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Etika Akademik. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 215–220. Retrieved from <https://doi.org/10.37676/jhs.v11i1.8089>
- Bondestam, F., & Lundqvist, M. (2020). Sexual Harassment in Higher Education—A Systematic Review. *European Journal of Higher Education*, 10(4), 397–419. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/21568235.2020.1729833>
- Dewi, A. K. (2014). Hubungan Kontrol Diri Dengan Perilaku Seksual Pranikah Pada Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, 3, 13–17. Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/dcp>

Antara Kampus Dan Kekerasan: Mengungkap Pola Sistematis Dalam Kasus Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Di Pulau Jawa

Dewi, S. K., & Tutpai, G. (2025). Pengaruh Personal Safety Skill Terhadap Self-Awareness Mahasiswa Sebagai Pencegahan Kekerasan Seksual di Kampus, 5(3), 1623–1630.

Faturahmah, E. (2025, April 24). Siaran Pers Komnas Perempuan Merespons Kasus Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi “Memastikan Ketidakberulangan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”.

Khairani, L., & Masitah, W. (2024). Mewujudkan Perguruan Tinggi Bebas dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual. *Abdi Saha: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 66–78. Retrieved from <https://doi.org/10.53695/jas.v5i2.1157>

Lando-King, E., McRee, A. L., Gower, A. L., Shlafer, R. J., McMorris, B. J., Pettingell, S., & Sieving, R. E. (2015). Relationships Between Social-Emotional Intelligence and Sexual Risk Behaviors in Adolescent Girls. *Journal of Sex Research*, 52(7), 835–840. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/00224499.2014.976782>

Nafisah, L., & Rizqi, Y. N. K. (2024). Sexual Violence on Campus: Student Experiences and Perceptions of Institutional Responses. *Al-Sihah: The Public Health Science Journal*, 16(2), 165–175. Retrieved from <https://doi.org/10.24252/al-sihah.v16i2.53356>

Quran, R. F. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486.

Salsabila, D. F., Hidayat, I. N., & Ramdani, Z. (2022). Stres Akademik dan Perceived Social Support sebagai Prediktor Kesehatan Mental Remaja Akhir. *Gajah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP)*, 8(2), 173–190. Retrieved from <https://doi.org/10.22146/gamajpp.76711>

Sasqiandini, M., Ghefira, N., & Ghifary, M. A. (2025). Pelanggaran Etika di Universitas Pancasila : Dugaan Pelecehan Seksual Mengguncang Integritas Kampus Universitas Pembangunan Jaya , Indonesia. *Harmoni Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/hardik.v2i1.1025>

SIMFONI PPA. (2025). *Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Pendidikan*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Retrieved 24 June 2025, from <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Tempo. (2025). Penjelasan Unpad soal Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswa PPDS. Retrieved 24 June 2025, from <https://www.tempo.co/politik/penjelasan-unpad-soal-kasus-kekerasan-seksual-mahasiswa-ppds-1229372>

Wulandari, Y. A., & Saefudin, Y. (2024). Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual: Perspektif Viktimologi. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 296–302.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).